



Buletin Parlementaria

Nomor 1011/II/VI/2018 • Juni 2018



DPR Perjuangkan PIMPINAN Status

Tenaga Honorer K2



Stok Beras Sumsel Siap Hadapi Lebaran





Rapat Kerja Gabungan antara DPR dengan Pemerintah terkait status Tenaga Honorer K2

DPR Perjuangkan Status Tenaga Honorer K2

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Kerja Gabungan dengan pemerintah, yang bertujuan untuk membahas nasib serta kesejahteraan Tenaga Honorer Kategori 2 (K2). Diadakannya rapat gabungan ini, menjadi komitmen DPR RI memperjuangkan status Tenaga Honorer K2.

“Kesimpulan dari rapat gabungan ini, pemerintah akan menyelesaikan status Tenaga Honorer K2 yang belum lulus tes, yakni sebanyak 438.590 orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto saat memimpin Rapat Kerja Gabungan tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Rapat gabungan ini diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Komisi I,

Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI DPR RI. Sementara pemerintah diwakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemendagri), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, DPR dan pemerintah sepakat akan melakukan Rapat Kerja Gabungan lanjutan dengan turut mengundang tiga menteri terkait lainnya. “Rapat Kerja Gabungan lanjutan akan kembali dilakukan pada hari Senin, 23 Juli 2018, dengan agenda Tahapan Penyelesaian Tenaga Honorer K2 dan akan mengundang juga Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” imbuh Utut.



Foto: Rumi/hr

sudah mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk memberikan surat edaran kepada gubernur di seluruh Indonesia, bahwa untuk tenaga kesehatan yang sifatnya tenaga sukarela atau honorer harus mendapatkan haknya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto mengaku bersyukur dengan diadakannya Rapat Gabungan ini. Menurutnya, selama ini salah satu hal yang menjadi kendala dalam memperjuangkan Tenaga Honorer K2 adalah sulitnya menyamakan dan memvalidasi data. Dengan hadirnya hampir seluruh Komisi DPR RI dan pemerintah, menjadi satu langkah positif untuk menyelesaikan masalah status Tenaga Honorer K2.

“Permasalahan K2 ini sudah lama sekali. Dari mulai tahun 2014 diadakan ujian, yang lulus 238 ribu, kurangnya masih 438 ribu lebih. Itu seolah-olah selesai, tapi ini masih menjadi masalah, karena tidak satu Komisi pun atau kementerian yang mampu untuk menyelesaikan ini. Makanya saya senang sekali ini sudah betul-betul mengerucut. Komisi X berkomitmen akan mengawal ini, supaya permasalahan K2 ini selesai,” komitmen politisi Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS harus melalui mekanisme tes CPNS. Hal itu dimaksudkan agar dapat menyaring tenaga-tenaga handal dan yang ada di bidang tersebut.

Dikatakannya, perintah tersebut tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012. Dalam aturan itu ditekankan agar tenaga honorer yang ada harus diseleksi melalui berbagai macam rangkaian tes. Ada banyak Tenaga Honorer K2 yang tidak lulus seleksi, yakni sekitar 438.590 tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS pada tahun 2013 lalu.

Sementara itu terkait masalah gaji para Tenaga Honorer, menurutnya hal tersebut bukanlah kewenangan dari pemerintah. Ia mengatakan, karena tenaga honorer sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab dari Kementerian atau Lembaga yang merekrutnya. “Yang merekrutlah yang harus bertanggung jawab untuk (masalah gaji) itu,” ucapnya. ■ dep,ann/sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

WAKIL KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega, Taufan Syahrullli

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, Geraldidi Opie

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Fadli Zon Bahas Penguatan Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia yang baru saja dilantik, Kim Chang-Beom di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6). Fadli menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dengan Korea Selatan semakin lama semakin baik dan terus berkembang di berbagai bidang.



Foto: Oji/hr

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan

Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan, maksud dan tujuan kedatangan Dubes Korsel tersebut adalah ingin menjaga hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Korsel tetap harmonis.

“Sebagaimana kita ketahui, kerja sama dengan Korsel ini sudah banyak di berbagai bidang. Di bidang militer, kita ada kerja sama pembuatan kapal selam, kemudian juga jet tempur. Kita juga ada kerja sama seputar pertanian. Jadi cukup banyaklah kerja sama yg dilakukan,” tutur Fadli.

Selain itu, dalam pertemuan juga membahas seputar kerja sama lain, terutama peningkatan hubungan *people to people contact* yang cukup besar saat ini, dengan hadirnya turis dan masuknya budaya Korsel ke Indonesia.

“Ada 350 ribu turis dari Korsel yang datang ke Indonesia. Dari Indonesia ada sekitar 250 ribu yang ke Korsel. Dan saya kira Korsel juga banyak mengirim karya-karya seni, budaya, drama Korea dan lain-lain di televisi kita, yang menjadikan Korsel familiar di mata masyarakat Indonesia,” paparnya.

Politisi dapil Jawa Barat itu juga mengakui, bahwa ini adalah pertemuan pertama setelah Kim Chang-Beom dilantik sebagai Dubes Korsel untuk Indonesia.

“Benar beliau adalah dubes yang baru saja berdinis kembali di Indonesia. Sebelumnya pernah juga pada 2003 hingga 2005 menjabat di Indonesia sebagai atase politik dan sekarang kembali ke Indonesia menjadi dubes,” ujarnya. ■ eps/sf

DPR Minta Aparat Selidiki Motif Gedung DPR Jadi Target Bom

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta aparat terkait, seperti Kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menyelidiki motif dari alumnus Universitas Riau yang diduga akan melakukan aksi teror dengan menjadikan Gedung DPR RI dan DPRD Riau sebagai sasaran target bom.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Foto: Andri/hr

Ancaman Teror ke DPR Cukup Jadi Data Intelijen

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sangat menyayangkan pernyataan yang disampaikan Kapolda Riau, Irjen Pol. Nandang yang mengungkapkan bahwa tiga terduga teroris yang ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bersama dengan Polda Riau di kampus Universitas Riau (UNRI), menargetkan peledakan di Gedung DPR RI dan DPRD Provinsi Riau.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Foto: Antef/hr

“Ancaman kepada Gedung DPR sudah sering kita dengar, dan sebaiknya itu tidak menjadi data yang diungkap, melainkan harus dilakukan investigasi secara menyeluruh, kenapa ancaman

seperti itu muncul,” papar Fahri dalam pesan singkatnya yang diterima awak media, Senin (4/6).

Harusnya, menurut Fahri, ancaman terhadap gedung wakil rakyat cukup menjadi data intelijen yang dikonsultasikan oleh kepolisian dengan satuan pengamanan yang sekarang bertugas di lingkungan DPR, agar pengamanan ditingkatkan. Bukannya menjadikan ancaman itu sebagai konsumsi publik.

“Sebab kalau setiap ancaman itu menjadi informasi publik, ini seolah-olah antar kelembagaan mengalami proses

Ancaman terhadap gedung wakil rakyat cukup menjadi data intelijen yang dikonsultasikan oleh kepolisian dengan satuan pengamanan yang sekarang bertugas di lingkungan DPR, agar pengamanan ditingkatkan

tawar menawar yang tidak baik,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.

Sekali lagi, lanjut Fahri, data-data seperti ini seharusnya tidak menjadi konsumsi publik, sebelum ada verifikasi secara menyeluruh. “Sebab, sudah berkali-kali pernyataan seperti ini dikeluarkan,” tutup Anggota DPR dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sebelumnya Kapolda Riau, Irjen Pol. Nandang dalam keterangan persnya mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan tiga terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror Polri bersama dengan Polda Riau di Universitas Riau menargetkan peledakan di Gedung DPR RI dan DPRD Provinsi Riau.

Diketahui, ke tiga terduga teroris masing-masing berinisial Z, D, dan K ditangkap tim gabungan di Gedung Gelanggang Mahasiswa, FISIP, Universitas Riau. Dari tangan ketiganya, polisi menyita empat unit bom rakitan yang menurut Nandang memiliki daya ledak tinggi.

Selain itu, polisi juga menyita sejumlah serbuk-serbuk bahan pembuat bom dari gelanggang mahasiswa FISIP Unri yang sejatinya merupakan sekretariat bersama kelembagaan mahasiswa tersebut. Nandang menjelaskan ketiga terduga teroris itu sengaja menggunakan kampus untuk menutupi jejak mereka, terutama dalam merakit bom.

“Kebetulan barang bukti ini dirakit di Sekretariat Kelembagaan Gelanggang Mahasiswa. Mereka numpang tidur di mes Mapala Sakai selama sebulan (selama perakitan bom),” ujarnya. ■ eko/sf

Hal ini menyusul terkuaknya rencana pengeboman Gedung DPR dan DPRD Riau usai penangkapan tiga alumnus Universitas Riau oleh Densus 88 Antiteror pada Jumat (1/6) lalu. Mereka adalah Muhammad Nur Zamzam, Rio Bima Wijaya, dan Orandi Saputra. Ketiganya disebut-sebut berencana meledakkan bom di Gedung DPR RI dan DPRD Riau.

“Motif dari pelaku yang rencananya menjadikan Gedung DPR sebagai target bom ini harus diusut secara tuntas. Walaupun sebenarnya ini kurang meyakinkan ya, apa kepentingannya. Karena Gedung DPR kan rumah rakyat. Kalau memang ada aspirasi yang ingin disampaikan, bisa datang ke sini. Tak perlu menggunakan teror seperti itu,”

Kita tidak mau DPR, dan semua wilayah di Indonesia menjadi sasaran teror. Pahami radikalisme, maupun aksi terorisme harus diberantas hingga ke akar-akarnya

kata Taufik ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (4/6).

Di sisi lain, walaupun tidak meyakini bahwa Gedung DPR akan dijadikan target bom, Taufik meminta seluruh pihak mewaspada hal ini. Taufik berharap, pengamanan dapat diperkuat, sehingga aksi radikalisme atau serangan teror tidak terjadi di DPR. Ia pun mengapresiasi Kepolisian, khususnya Densus 88 Antiteror yang berhasil mengendus rencana itu.

“Kita tidak mau DPR, dan semua wilayah di Indonesia menjadi sasaran teror. Pahami radikalisme, maupun aksi terorisme harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Kita apresiasi langkah Densus 88 yang bisa menggagalkan rencana serangan ke DPR ini. Dan kita dorong agar hal ini dapat diselidiki, dalam kaitan motif si pelaku,” tandas politisi PAN itu.

Diketahui, Jumat (1/6/2018) lalu, Densus 88 Antiteror Polda Riau menangkap tiga alumnus Universitas Riau. Ketiganya ditangkap di gedung Gelanggang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Mereka telah mempersiapkan empat bom rakitan berdaya ledak tinggi siap ledak. ■ sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membuka Pasar Murah dan Bazar PIA DPR RI di Gedung Nusantara V DPR RI

Ketua DPR: UMKM Menggerakkan Ekonomi Rakyat

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi rakyat. Pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998, sektor ini terbukti mampu bertahan dari terpaan badai krisis ekonomi. Demikian pula ketika terjadi fenomena perlambatan ekonomi pada tahun 2015, sektor UMKM tetap mampu bertahan dan menjalankan aktivitas ekonominya dengan baik.

“Sayangnya peran UMKM masih sering dianggap remeh dan dipandang sebelah mata. Sebagai salah satu langkah nyata mendorong bangkit, maju, dan tumbuhnya UMKM, DPR RI bekerja sama dengan Persatuan Istri Anggota (PIA) menggandeng UMKM menyelenggarakan Pasar Murah dan Bazar dengan mengambil tema *Magnificent Ramadan*,” ujar Bamsuet, sapaan akrabnya, saat membuka Pasar Murah dan Bazar PIA DPR RI di Gedung Nusantara V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, pasar murah dan bazar ini dapat menjadi ajang bagi para pengusaha UMKM untuk memasarkan produknya. Selain, sebagai ajang promosi menunjukkan hasil karyanya yang berkualitas dan tidak kalah dengan produk impor.

“Saya berharap kesempatan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Para pengusaha UMKM bisa semakin mengenalkan produknya kepada kalangan yang lebih luas dan membuka jaringan usaha yang baru. Kita semua juga perlu terus mendukung UMKM agar tetap

dapat berproduksi dan bahkan meningkatkan produksinya dengan cara menggunakan berbagai produk UMKM tersebut dalam kehidupan sehari-hari,” papar Bamsuet.

Bamsuet mengungkapkan, DPR sendiri terus memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM, baik melalui penyediaan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan dana bergulir, peningkatan akses pemasaran maupun dengan program-program pelatihan.

Namun para pelaku usaha diminta juga harus kreatif mengembangkan usahanya, terutama dalam pemasaran di era Revolusi Industri 4.0 dimana internet memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat.

“Selain melakukan pemasaran secara konvensional, UMKM juga harus memasarkan produknya secara *online*. Jika ini dilakukan, saya yakin hasilnya akan dahsyat. Peluang untuk bekerja sama dengan berbagai *marketplace* seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee dan lainnya sangat terbuka,” kata Bamsuet.

Dalam acara tersebut, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini secara simbolik juga memberikan paket sembako untuk dua puluh orang lebih pekerja di lingkungan DPR RI maupun di lingkungan sekitar DPR RI. Antara lain *office boy*, *cleaning service*, petugas keamanan, sampai kalangan wartawan.

“Terselenggaranya kegiatan pasar murah dan bazar dari tanggal 4-6 Juni 2018 akan membuat gedung rakyat semakin diramaikan dengan aktivitas ekonomi antara para pedagang dengan para pengunjung yang ingin berbelanja memenuhi kebutuhan pokoknya. Dari mulai sembako, pakaian kerja, batik, aneka kue, sampai kebutuhan alat rumah tangga lainnya,” pungkas Bamsuet. ■ rnm/sf

Stok Beras Sumsel Siap Hadapi Lebaran

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyatakan, ketersediaan dan distribusi stok beras di Sumatera Selatan (Sumsel) siap untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Pasokan beras tersebut dinilai sesuai target untuk tiga bulan ke depan.

Setelah melakukan peninjauan, pengadaan beras di Sumsel aman dan siap untuk tiga bulan ke depan serta tidak ditemukan adanya keluhan dan masalah. Insya Allah ke depan, Bulog bisa menyetok beras tanpa harus impor,” ungkap Edhy usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) GBB Karya Baru, Palembang, Sumsel, Rabu, (30/5).

Saat melakukan peninjauan, Tim Komisi IV DPR RI mendapatkan masukan dari Bulog terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang terdapat di Gudang Bulog GBB Karya Baru. CBP tersebut hanya disimpan dan boleh digunakan jika ada instruksi atau perintah dari Pemerintah.

“Bulog sendiri tidak boleh menyentuh CBP tersebut tanpa adanya perintah. Ini sangat disayangkan sekali, harusnya Bulog diberi wewenang untuk mengelola CBP. Kenapa CBP ini bisa disimpan sampai berbulan-bulan, empat bulan saja kualitasnya sudah berubah. Apalagi jika beras yang didatangkan dari hasil impor, itu kualitas beras yang dimakan untuk kebutuhan masyarakat menjadi tidak bagus lagi,” jelasnya.

Di sisi lain terkait impor beras, politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan tidak seharusnya Bulog menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan. Karena Bulog hanya menerima perintah dari Menteri Perdagangan, sehingga mau tidak mau harus dijalkan.

“Kami di Komisi IV konsisten menolak segala bentuk jenis impor selama cadangan dalam negeri masih mampu mencukupi kebutuhan beras. Faktanya kurang adil jika kita menilai Bulog menjadi pihak yang disalahkan. Padahal Bulog hanya menguasai tidak lebih dari 2 persen,” tegas Edhy.

Edhy menambahkan, potensi uang negara sebesar Rp12 triliun yang biasanya digunakan oleh Bulog untuk membeli beras dari petani kini dikuasai oleh pasar. “Lalu siapa yang miliki pasar? Hilangnya kekuasaan Bulog di pasar ini apakah benar karena *supply*-nya tidak ada, produksinya tidak ada, atau karena di pasar dikuasai oleh kelompok tertentu? Ini yang harus jadi perhatian,” tuturnya.

Untuk itu, ke depan Edhy meminta pemerintah untuk bisa berkoordinasi dan duduk bersama untuk menangani persoalan kepentingan nasional ini.

“Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian harus duduk bareng, bersama-sama menangani kepentingan rakyat. Karena sudah diatur di UUD 1945 Pasal 33 itu mengamanatkan kita untuk menjaga segala bentuk kepentingan yang menguasai hajat hidup orang banyak,” imbuh politisi Dapil Sumsel itu.

Sementara itu di kesempatan yang sama, menanggapi persoalan impor beras, Direktur Utama (Dirut) Keuangan Bulog Triyana menilai, hal ini bukan permasalahan setuju atau tidak, namun yang terpenting kepentingan petani dan konsumen tetap terjaga. Harga yang diberikan tidak boleh terlalu tinggi atau pun rendah. “Karena kami ini punya misi jangan sampai masyarakat merasa beras kemahalan, dan jangan sampai satu sisi lain petani merasa harga terlalu murah,” ungkapnya.

Kunjungan Kerja ini turut diikuti oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan (F-PKB), serta sejumlah Anggota, diantaranya Tagore Abubakar, Agustina Wilujeng, Rahmad Handoyo, dan Effendy Sianipar dari F-PDI Perjuangan, Siti Hediati Soeharto dan Salim Fakhry dari F-PG, Darori Wonodipuro dan Felicitas Talulembang dari F-Gerindra, Ahmad Yohan (F-PAN), Hermanto (F-PKS), Kasriyah (F-PPP), Muchtar Luthfi (F-Nasdem) dan Fauzi H. Amro (F-Hanura).

■ tra/sf



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) GBB Karya Baru, Palembang

Foto : Tiara/hr



Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meninjau Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur

Foto: Rumi/hr

Harga Komoditas Pangan di Jatim Alami Kenaikan

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meninjau Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/5), guna melihat pergerakan harga komoditas pangan dan ketersediaan pasokan selama Ramadan dan jelang hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah.

DPR Nilai Sosialisasi *Bomb Joke* Perlu Dilakukan

Gurauan mengenai adanya bom (*bomb joke*) di pesawat tentunya sangat meresahkan bagi para penumpang, karena membahayakan keselamatan penerbangan. Bahkan, selama Mei 2018 saja setidaknya terjadi 6 kasus orang melakukan *bomb joke* pada beberapa maskapai penerbangan, seperti Batik Air, Lion Air, hingga Garuda Indonesia.



Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Arwani Thomafi

Foto: Arief/hr

saat ditemui Parleментарia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini beranggapan bahwa seharusnya setiap orang di era modern ini lebih cerdas dalam melakukan aktivitas. Dirinya

Kasus ini pun menjadi perhatian publik, karena akibat dari penyebaran informasi palsu itu, hingga menimbulkan korban luka-luka. Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Arwani Thomafi menilai, masih banyak

orang tidak memahami dampak dari menyampaikan berita bohong.

"Hal yang dianggap bercanda itu bisa saja akan memiliki resiko serius serta dampak yang diakibatkan bisa fatal. Hal ini harus terus kita sampaikan ke masyarakat," ujarnya

Dari hasil peninjauan dan berbincang langsung dengan pedagang, sebagian besar harga komoditas pangan mengalami kenaikan. Salah satunya, harga komoditas beras Bulog, yang awalnya berkisar Rp8300 per kilogram, sekarang di jual Rp8900. Bahkan pedagang mengeluhkan kualitas beras Bulog yang kurang baik, jadi kurang laku.

Kenaikan harga juga dialami pada komoditas daging ayam potong. Kini, harga daging ayam potong dibanderol Rp36 ribu per kg. Padahal biasanya dijual Rp28 ribu sampai Rp30 ribu per kg. Komoditas ikan juga mengalami kenaikan. Biasanya ikan gurame dibanderol Rp35 ribu per kg, kini menyentuh harga Rp40 ribu per kg.

Menanggapi kenaikan sejumlah komoditas pangan di Jatim, Viva Yoga meminta pihak terkait agar bisa berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk memonitor secara detail penyebab terjadinya kenaikan harga di seluruh wilayah Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Jadi kalau ada kenaikan harga kita bisa mengetahui atau melihat apakah penyebabnya dari kekurangan pasokan atau karena ada faktor lain,” ungkapnya usai kunjungan dengan didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Haryadi, Dirjen PSDKP Kementerian Perikanan dan Kelautan Rifky Effendi, Direktur Logistik PSDKP Sadullah Muhandi, perwakilan Kementerian Pertanian, beserta jajaran Bulog.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, kenaikan harga komoditas pangan ini sudah menjadi trend menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia khawatir hal ini bisa berdampak pada konsumen. ■ rni/sf

mempertanyakan apakah pemahaman seorang calon penumpang pesawat mengenai penyampaian berita bohong di muka umum adalah sesuatu yang melanggar hukum itu masih kurang.

Menurutnya, jika memang masyarakat kekurangan informasi terhadap hal tersebut, maka ia meminta agar seluruh pihak saling bantu mensosialisasikan ulang mengenai larangan menyampaikan berita bohong, apalagi hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Penerbangan.

“Yang perlu kita lakukan adalah aparat dan seluruh pihak yang memiliki kepentingan seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama perlu untuk terus mensosialisasikan mengenai larangan penyampaian berita bohong,” pungkaskan politisi dapil Jawa Tengah itu. ■ eps/sf

PPN Untia Sepi Kegiatan Perekonomian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut dan memiliki potensi perikanan yang besar dan beragam. Namun, hal itu justru tidak terlihat pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia di Kecamatan Binangkaya, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. PPN Untia ternyata sepi dari kegiatan perekonomian, terutama jual-beli tangkap ikan.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena

Foto: Arief/hr

“Kami melihat bahwa ini perlu penanganan yang lebih ekstra, mengingat pelabuhan ini pembiayaannya mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 telah menelan biaya sebesar Rp202 miliar,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke PPN Untia, Makassar, Sulsel, Rabu (30/5).

Diketahui, PPN Untia diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu. Namun melihat kegiatan dan aktivitas PPN Untia saat ini, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah terhadap pembangunan pelabuhan perikanan itu.

“Sarana dan prasarana belum memberikan suasana yang mendukung dari pada operasi pelabuhan perikanan dan juga para nelayan. Akses jalan ke pelabuhan banyak yang hancur, akses air bersih sangat terbatas, dan juga SPBU untuk melayani nelayan juga belum ada,” imbuah politisi Partai Demokrat itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala PPN Untia Andi Mannojengi menambahkan, pihaknya telah berkomitmen untuk memajukan kawasan Pelabuhan Untia.

“Seiring dengan adanya minat investor, ada 15 perusahaan yang menyatakan tertarik untuk pengelolaan Pelabuhan Untia. Dan 8 perusahaan sudah ada kesepakatan kontrak dan baru 5 perusahaan yang dalam proses,” jelas Andi. ■ afr/sf



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur dan angkutan di Bali

Foto: Nita/hr

Infrastruktur dan Angkutan Bali Siap Hadapi Mudik Lebaran 2018

Wakil Ketua Komisi V DPR Anton Sukartono Suratto mengatakan, semua lini yang berkaitan dengan infrastruktur dan angkutan di Bali, dinilai siap menghadapi arus mudik Lebaran 2018.

“Alhamdulillah kita rekomendasikan. Semua lini baik dari Kepolisian, Dirjen Perhubungan Laut dan Udara, Angkasa Pura, ASDP, Basarnas, BMKG, Airnav, siap menampung angkutan yang akan datang ke Bali,” kata Anton saat memimpin

pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra kerjanya, di Denpasar, Bali, Kamis (31/5).

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, kesiapan juga terlihat dari infrastruktur jalan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mempersiapkan infrastruktur jalan.

Lubang-lubang di jalan hingga marka jalan akan di perbaiki semua.

“Angkasa Pura 1 juga siap menghadapi lonjakan penumpang yang akan datang ke Bali, karena juga akan ada penambahan kuota untuk *airline*. Jadi kita mengecek apakah semuanya siap, dan Alhamdulillah dikatakan semuanya

siap,” apresiasi politisi dapil Jawa Barat itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Ade Rezki Pratama mengapresiasi semua langkah strategis yang telah dipersiapkan Pemprov Bali dan pihak terkait lainnya, berkaitan dengan mudik Lebaran 2018 kali ini. Apalagi Bali ini bukan hanya tujuan mudik dari Bali ke Pulau Jawa atau luar Provinsi Bali, tetapi juga menjadi tujuan liburan mudik.

“Oleh karena itu, paparan-paparan dari bapak-bapak sekalian, secara teknis kami tentunya sangat menghargai semua dan kami juga kembalikan kepada bapak sekalian yang telah membuat rencana strategis dalam menghadapi ketupat agung di Provinsi Bali ini. Tentunya pengawasan juga bapak sendiri yang akan melakukannya,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya dalam pertemuan, seluruh mitra kerja Komisi V DPR menyatakan kesiapannya dalam menghadapi mudik Lebaran 2018 mendatang, khususnya untuk Bali. Langkah-langkah strategis untuk kesiapan sarana dan prasarana infrastruktur dan angkutan tengah dilakukan. Tim Posko Terpadu mudik yang terdiri dari sejumlah instansi telah dibentuk.

Manajemen Angkasa Pura I dalam paparannya menjelaskan, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada periode Lebaran 2018 ini berencana akan membuat *extra flight*. Penambahan terdiri dari 8 *airlines*, 12 rute penerbangan, jumlah *MOV Aircraft Extra Flight* dengan total 740 *movement aircraft* terdiri dari 370 *DEP* dan 370 *ARR*. Estimasi kenaikan periode Lebaran 2018 sebesar 10 persen.

Kunjungan kerja ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, diantaranya Yoseph Umarhadi (F-PDI Perjuangan), Sudjadi (F-PDI Perjuangan), Ridwan Bae (F-PG), Ida Bagus Puti Sukarta (F-Gerindra), Novita Wijayanti (F-Gerindra), Hartanto Edhi Wibowo (F-PD), Nurhasan Zaidi (F-PKS), Nurhayati (F-PPP), Syarief Abdullah Alkadrie (F-NasDem), Soehartono (F-NasDem), dan Lalu Gede Syamsul Mujahidin (F-Hanura). ■ nt/sf

Terminal Regional Daya Sulsel Belum Siap Hadapi Mudik Lebaran

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau kesiapan infrastruktur dan angkutan Lebaran tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), seperti Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, dan Terminal Regional Daya. Dari tiga lokasi itu, Terminal Regional Daya dinilai belum siap menghadapi mudik Lebaran tahun ini.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir yang memimpin Tim Kunzer mengatakan, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dinilai sudah siap menghadapi mudik Lebaran.

“Kami sudah melakukan pertemuan secara internal. Dari situ kami mendapatkan data sejauhmana kesiapan tiga titik ini dalam mengantisipasi angkutan lebaran. Bandara dan pelabuhan sudah siap. Namun, terminal ini yang masih ada masalah,” ungkap Ibnu di Makassar, Sulsel, Rabu (30/5).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, khusus untuk Terminal Regional Daya masih banyak yang perlu dibenahi, mulai dari sarana dan prasarana, sehingga penumpang bisa nyaman berada di dalam terminal.

“Kita sudah lihat langsung, dan ada sedikit masalah di terminal ini. Seperti dalam terminal, jalan bergelombang, penataan parkir kendaraan masih semrawut dan terlihat tidak seperti terminal. Ini perlu tata kelola transportasi darat yang lebih baik. Untuk itu, terminal ini mesti ada pembenahan dan langkah untuk menghadapi mudik Lebaran,” jelas Ibnu.

Politisi dapil Sulawesi Barat itu menambahkan, selain Sulsel, Komisi V DPR RI juga meninjau kesiapan infrastruktur dan angkutan Lebaran tahun 2018 di Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur.

“Ketiga tempat ini termasuk daerah yang kita anggap penting menjelang mudik Lebaran. Nanti satu minggu sebelum lebaran kita akan melakukan lagi kunjungan ke beberapa tempat yang kita anggap penting juga,” tutupnya. ■ iw/sf

Foto: Iwan/hr



Tim Kunker Komisi V DPR meninjau Stasiun KA Banyuwangi

Manajemen KA Banyuwangi Diminta Perbaiki Sistem Waktu Perjalanan

Anggota Komisi V DPR RI Gatot Soedjito menyatakan, agar manajemen KA Banyuwangi memperbaiki sistem waktu perjalanan agar lebih cepat dan meningkatkan sarana dan prasarananya. Kemudian, mode transportasi angkutan publik perlu diusulkan supaya terkoneksi antara stasiun, pelabuhan dan bandara.

Mengenai waktu perjalanan, menurut Gatot, dari Surabaya ke Banyuwangi dibutuhkan waktu 6 jam, tentu ini masih terlalu lama. Setelah diselidiki ternyata konstruksi relnya belum *double track*.

“Mestinya bisa dipercepat, ada usulan setiap stasiun jangan terlalu lama, dibuat 2-3 menit tapi stasiunnya ditambah, sehingga masyarakat bisa lebih mendapatkan kesempatan

dan waktunya tidak banyak tersita,” jelas Gatot saat meninjau Stasiun KA Banyuwangi, Rabu (30/5).

Kemudian, kata Gatot, belum adanya sarana angkutan publik di sekitar stasiun, yang ada saat ini hanya ojek. Kami sudah mengusulkan Dirjen Perhubungan Darat untuk membantu Pemda terkait pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) yang bisa membawa penumpang dari stasiun ke pelabuhan

atau sebaliknya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono menyayangkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp7,5 triliun yang harusnya digunakan untuk menambah rangkaian Kereta Api Sumatera-Jawa justru dialihkan untuk LRT.

“Padahal menurut saya LRT tidak mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita, karena sudah salah dalam konsep membangun transportasi yang efisien dan efektif untuk rakyat. Tidak ada LRT yang dibangun antar kota, biasanya dalam kota dalam suatu kawasan-kawasan yang tersambung dengan MRT atau kereta rel, tetapi ini tidak tersambung dengan



Foto : Jaka/hr

kereta-kereta lain,” ujarnya
Apalagi, lanjut Bambang pambangunan LRT ini mengorbankan dana yang diperuntukkan transportasi publik, baik untuk penumpang maupun logistik. Seharusnya dengan dana ini bisa menumbuhkan perekonomian yang lebih baik. ■ jk/sc

Mestinya bisa dipercepat, ada usulan setiap stasiun jangan terlalu lama, dibuat 2-3 menit tapi stasiunnya ditambah, sehingga masyarakat bisa lebih mendapatkan kesempatan dan waktunya tidak banyak tersita

Komisi VI Dorong Pengembangan Koperasi Berbasis Produksi

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memberikan perhatian khusus kepada koperasi yang berbasis produksi. Komisi VI juga siap bersama pemerintah mengawal, sehingga menjadikan koperasi berbasis produksi sebagai koperasi unggulan dan menjadi kebanggaan negeri.

“Koperasi yang biasa dijadikan contoh sukses di negara ini adalah koperasi yang berbasis simpan pinjam. Sementara koperasi di negara maju seperti di Skandinavia, mereka memiliki basis produksi atau usaha produktif, dimana ada *multiplier effect* yang nantinya dirasakan oleh masyarakat sekitarnya,” terang Teguh saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

Teguh menambahkan, saat ini koperasi simpan pinjam masih sangat mendominasi, karena mereka sudah berperan di dalam kehidupan masyarakat. Namun Komisi VI ingin mendorong Kemenkop dan UKM juga melakukan pembinaan lebih intensif terhadap potensi-potensi koperasi yang bisa dijadikan unggulan. Khususnya koperasi yang terkait dengan sektor-sektor produksi.

Di samping itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menagih komitmen Presiden Joko Widodo yang disampaikan saat peringatan HUT Koperasi ke-70 tanggal 12 juli 2017 lalu, dimana Presiden mengatakan komitmen dan fokus adalah kunci utama suksesnya koperasi.

Namun, tiga tahun berturut-turut anggaran Kemenkop dan UKM di bawah Rp1 triliun. Harus disadari, hal ini karena keterbatasan

APBN. Pengembangan koperasi perlu diprioritaskan, karena dalam berbagai kesempatan komitmen Presiden adalah untuk mengembangkan koperasi dan usaha menengah.

“Sebagai pilar perekonomian yang di tengah krisis ekonomi sekalipun, koperasi mampu bertahan. Namun amat disayangkan bahwa sampai saat ini belum ada komitmen dalam bentuk keberpihakan politik anggaran,” tandas politisi dapil Jawa Tengah ini.

Kendati komitmen tersebut belum diwujudkan dalam bentuk keberpihakan negara kepada koperasi, namun yang perlu diapresiasi adalah komitmen Kemenkop dan UKM untuk memanfaatkan keterbatasan anggaran yang ada.

“Mungkin benar Presiden sudah berkomitmen. Namun di jajaran pendukungnya ini seperti Menteri Keuangan atau Bappenas belum menunjukkan komitmen yang lebih konkret lagi untuk membela koperasi dan UKM kita. Salah satunya adalah memberikan alokasi dana yang lebih lagi untuk koperasi ke depan,” pungkasnya. ■ es/sf



Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno

Foto : Andri/hr

TPID Jatim Dinilai Mampu Kontrol Faktor Penyebab Inflasi

Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja pengawasan inflasi pada Bulan Ramadhan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Dalam kunker ini, Anggota Komisi IX DPR RI Eva Kusuma Sundari menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur mampu mengontrol faktor-faktor penyebab inflasi di daerah.

“Tampaknya faktor-faktor penyebab inflasi yang sifatnya dari daerah itu bisa dikontrol mereka. Yang mereka takutkan adalah yang administratif itu, seperti kebijakan pusat. Misalkan harga minyak yang subsidinya dicabut. Jadi relatif aman, kecuali ada kebijakan pusat yang memicu inflasi,” jelas Eva saat pertemuan dengan TPID Jatim, Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Badan Pusat Statistik Jatim, di Gedung BI Jatim, Rabu (30/5).

Menurutnya, banyak terobosan yang dilakukan TPID Jatim. Eva mencontohkan, seperti pembangunan klaster agar saling mengontrol inflasi dari pertukaran komoditas yang dimulai dari Jakarta. Menurutnya ini mungkin sudah bisa direplikasi dengan yang lain. “Itu merupakan upaya pengendalian inflasi yang terlembaga, jadi bisa menghindari siklus inflasi secara permanen,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga



Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari

memaparkan, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Jatim ternyata memiliki *share* pada perekonomian nasional yang tinggi, plus pada peran potensial untuk

mengendalikan inflasi. “Jadi ada banyak temuan yang perlu didalami untuk penyelesaian pengendalian inflasi yang sifatnya lebih fundamental,” paparnya.

Namun berkenaan dengan kebutuhan pangan yang berasal dari produksi pertanian, Eva mengungkapkan akses pada pupuk bersubsidi ataupun yang tidak bersubsidi tidak bisa diperoleh petani dengan lancar, sehingga menjadi hambatan yang cukup serius bagi petani. Dalam hal ini, dia mengkritisi kekosongan peran mediasi perbankan.

“Itu harus direspon secara struktural, karena yang diperankan selalu mencoba melakukan mediasi, tetapi melalui Bansos, sehingga tidak menyelesaikan persoalan. Sementara perbankan tidak mau masuk bisnis mediasi untuk petani, tidak seperti di Jepang dan Thailand,” ungkap Eva.

Menurut politisi dapil Jatim itu, persoalan ini menjadi ‘PR’ yang cukup serius bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam menjaga agar peran petani tidak terus menurun. Jika persoalan ini tak bisa diatasi dengan baik, inflasi yang dikendalikan seberapa pun nanti tetap menjadi penyebab kemiskinan yang makin memburuk di pedesaan. ■ *eko/sf*

Pasokan Energi di Sulawesi Aman

Ketersediaan Energi baik BBM maupun gas serta pasokan listrik dalam rangka menyambut lebaran dan pasca lebaran tahun 2018 untuk wilayah Sulawesi aman.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung usai pertemuan dengan Direksi PT. Pertamina (Persero), Direksi PT. PLN (Persero), Dirjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dan Hiswana Migas yang membahas kesiapan energi dan pasokan listrik dalam rangka lebaran di Sulawesi.

“Tidak ada satu hal yang

mengkhawatirkan, meskipun tadinya kami ada kekhawatiran karena kuota premium diturunkan yang tadinya di tahun 2017 1,6 juta kilo liter, sekarang menjadi sekitar 800 kilo liter. Namun penetapan kuota 800 kilo liter ini didasarkan pada realisasi tahun lalu yang hanya lebih dari 700 kilo liter,” papar Wakil Ketua Komisi VII ini di Terminal BBM dan LPG Marketing Operation Region VII di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (4/5).

Tamsil mengharapkan tidak



Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung

Komisi II Bahas Aturan Penyelenggaraan Pemilu

Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dirjen Otda, Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan peraturan baru terkait penyelenggaraan Pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, ada lima butir aturan yang dibahas, yaitu terkait Peraturan Bawaslu tentang pengawasan kampanye Pemilu, dana kampanye, pencalonan peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan Bawaslu tentang pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian penyelenggaraan pemilu.

“Belum ada kesepakatan antara DPR dan Bawaslu terkait peraturan tentang kampanye, yaitu mengenai citra diri dan peraturan Bawaslu yang meminta parpol memberitahu Bawaslu satu hari sebelum menyelenggarakan kegiatan termasuk kegiatan internal,” jelasnya disela-sela RDP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

Nini, sapaan akrabnya menjelaskan, Peraturan Bawaslu yang dimaksud

adalah parpol memberitahu apabila akan menyelenggarakan kegiatan agar tidak terjadi kampanye sebelum waktu masa kampanye dimulai, yaitu tanggal 23 September-13 April 2019.

“Semangat kita sama mengatur untuk memberi kemudahan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Namun, jika setiap kegiatan internal parpol harus memberitahu kepada Bawaslu kami keberatan, karena kami hampir setiap hari melakukan rapat konsolidasi,” kata legislator PKB itu.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman yang menyatakan ketidaksepakatannya apabila kegiatan internal parpol harus diberitahu ke Bawaslu. Pertama, saat ini ia adalah peserta politik yang harus menyampaikan pendidikan politik.

“Kalau kita mau sampaikan pendidikan politik ini baik internal maupun eksternal itu sikap politik kita, janganlah ini diatur, ini kan sudah diatur dalam UU Parpol.

kuota.

Ia juga menjelaskan, dalam pertemuan dengan pemangku sektor energi tersebut, ada jaminan bahwa nihil persoalan di Sulawesi ini baik menyangkut masalah BBM, gas maupun listrik. “Termasuk sudah diantisipasi segala kemungkinan bila terjadi kerusakan, ada bencana ataupun keadaan darurat lainnya, semua sudah diantisipasi. Saya kira ini sangat menggembirakan,” ungkapinya.

Lebih lanjut, anggota dewan dapil Sulawesi Selatan ini menjelaskan bahwa hasil pertemuan tersebut akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk melihat sejauhmana jaminan itu betul-betul menjadi fakta di lapangan terutama juga di pesantren-pesantren dan masjid-masjid terutama terkait jaminan tentang listrik.

“Terkait antisipasi terhadap kelangkaan LPG akan kita pantau, tadi

Jangan dibuat aturan baru,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Sementara terkait citra diri, dijelaskan dalam rapat bahwasanya Bawaslu mengatur, karena dikhawatirkan ada pihak yang memiliki kekuatan, sehingga akan lebih masif dalam mensosialisasikan mengenai citra diri dibandingkan yang tidak memiliki kekuatan.

Namun, hal tersebut juga belum ada kesepakatan, karena aturan citra diri tentang alat peraga kampanye yang dirasa kurang memberi ruang bagi parpol. Untuk itu, Komisi II meminta Bawaslu dan KPU untuk kembali merumuskan peraturan mengenai kampanye tersebut. ■ rnm/sf



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh (kanan)

Foto: Singgih/hr

Dalam pertemuan dengan pemangku sektor energi tersebut, ada jaminan bahwa nihil persoalan di Sulawesi ini baik menyangkut masalah BBM, gas maupun listrik. “Termasuk sudah diantisipasi segala kemungkinan bila terjadi kerusakan, ada bencana ataupun keadaan darurat lainnya, semua sudah diantisipasi. Saya kira ini sangat menggembirakan

terjadi kelangkaan-kelangkaan yang mengakibatkan realisasi menjadi berkurang dan menjadi dasar penetapan

saya minta kepada Anggota Komisi VII dapil Sulawesi yang hadir yaitu Andi Yulianis Paris dan Mukhtar Tompo termasuk saya untuk memantau. Kami akan bekerja bertiga melanjutkan kunjungan kerja ini, apakah itu dalam bentuk kunjungan kerja dapil maupun kunjungan yang menjadi penugasan dari Komisi VII,” terangnya.

Selaku Pimpinan Komisi VII dan Ketua Tim Kunjungan, ia meminta Anggota Komisi VII dapil Sulawesi ini untuk berkoordinasi dengan mitra kerja Komisi VII di Sulawesi untuk melakukan pengawasan-pengawasan lebih lanjut demi terjaminnya keamanan dan kesiapan BBM, LPG dan listrik menghadapi lebaran dan pasca lebaran. “Demikian juga di luar lebaran kami akan tetap kerja memantau ketersediaan energi,” imbuhnya. ■ sc



Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau Rest Area Tol Cipali KM 102, Subang, Jawa Barat

Foto: Rizka/hr

Komisi VII Pertimbangkan Regulasi BBM Kemasan

Belum adanya regulasi yang mengatur penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kemasan atau eceran di luar penjualan pom bensin, mendorong Komisi VII DPR RI untuk mempertimbangkan regulasi terkait hal tersebut. Khususnya dalam keadaan darurat seperti saat arus mudik maupun balik Lebaran, bahan bakar menjadi bagian terpenting.

“BBM kemasan ini secara resmi belum ada regulasinya. Tetapi karena situasi ini sangat mendesak tentu ini diberikan dispensasi oleh regulator untuk dipergunakan sebagai antisipasi terhadap kemacetan panjang di tengah jalan yang tidak ada akses terhadap SPBU,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Rest Area Tol Cipali KM 102, Subang, Jawa Barat, Senin (4/6).

Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Komisi VII melakukan uji coba sistem baru yang diterapkan pada stasiun pengisian yang secara canggih

memonitor semua proses pengisian bahan bakar dan penghitungannya. Tim juga melihat armada distribusi dari satgas BBM dan ditunjukkan aneka kemasan bensin ukuran kecil yang memang lebih mudah diedarkan serta pengadaan beberapa alat dispenser untuk kios keliling pengisian BBM.

“Saya kira ini juga menjadi pertimbangan kami di DPR bersama pemerintah bagaimana nanti melahirkan regulasi-regulasi untuk bisa mempermudah keterjangkauan terhadap BBM, di situasi dan kondisi apapun di masyarakat jadi akan ada regulasi resmi termasuk regulasi untuk pom Pertamina

kecil atau Perta-shop,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Regulasi itu, tambah Herman, nantinya akan bisa mengatur secara resmi keberadaan SPBU yang mobile, sehingga tidak hanya saat arus mudik dan balik lebaran saja.

Sementara itu dalam keterangannya, General Manager Pertamina MOR III Erry Widiastono menjelaskan, beberapa persiapan yang dilakukan untuk wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat antara lain menyediakan 23 titik Kios Kemasan, 30 unit motorist BBM, 3 unit Mobile Dispenser, 50 titik SPBU kantong dan 4 unit Serambi Pertamax.

“Kami berharap dengan persiapan yang maksimal ini, maka penyaluran BBM untuk masyarakat dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, para Anggota Komisi VII juga mensosialisasikan penggunaan *e-wallet* yaitu *t-cash* sebagai alat bayar dalam membeli BBM di SPBU. Membagikan beberapa stiker dompet elektronik dan mendemonstrasikan pengisian sekaligus proses pembayarannya. ■ ran/sf

Komisi VII Nilai Persiapan Pertamina, PLN, dan PGN Jelang Idul Fitri Cukup Baik

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai meski masih ada beberapa catatan, namun secara keseluruhan persiapan yang dilakukan beberapa mitra kerjanya seperti Pertamina, PLN, dan PGN dalam menghadapi hari raya Idul Fitri lebaran terbilang sudah cukup baik. Hal tersebut diungkapkannya usai meninjau Terminal BBM Kertapati MOR (Marketing Operation Regional) II Sumatera Bagian Selatan, Palembang, Senin (4/6).

“Sebagaimana diketahui di bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri terjadi peningkatan aktivitas di masyarakat, diantaranya seperti penggunaan Elpiji 3 Kg, penggunaan Listrik rumah tangga, serta kebutuhan BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk keperluan mudik. Untuk menghadapi hal itu tentu dibutuhkan persiapan yang matang dari berbagai BUMN yang notabene sebagai mitra kerja kami. Setelah kami mendengar pemaparan dan meninjau langsung stok BBM di Pertamina, kami menilai sudah cukup baik persiapan yang dilakukan Pertamina, PLN maupun PGN. Dengan kata lain saya optimis

bahwa semua akan berjalan dengan baik,” jelas Gus Irawan.

Meski demikian ada beberapa catatan yang tetap harus diperbaiki, salah satunya adalah masih akan terjadinya kelangkaan premium, terutama di wilayah Jamali (Jawa, Madura, dan Bali). Sebagaimana diketahui sebelumnya Pertamina menerima penugasan dari pemerintah untuk wilayah di luar Jamali.

Namun belakangan ada penugasan baru untuk premium dari pemerintah ke Pertamina yakni sekitar 4,3 KL untuk wilayah Jamali. Seharusnya menurut Gus hal itu akan membuat kondisi lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun mengingat alokasi premium juga sangat terbatas, maka politisi dari Fraksi Partai

Gerindra ini memprediksi bahwa kelangkaan premium tetap masih akan terjadi. Sementara gas elpiji 3 Kg, meski pasokannya sesuai kuota, namun secara keseluruhan stok yang ada terbilang cukup untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Idul Fitri.

Sementara dari PLN, ia meyakini PLN surplus daya listrik, tapi potensi pemadaman tetap masih akan terjadi. Pasalnya, ada tiga titik krusial di pemadaman, pertama daya yang kurang, dalam hal ini Sumatera bagian selatan terbilang surplus, namun masih ada hal lain yang bisa menyebabkan pemadaman listrik diantaranya cuaca atau iklim, serta adanya jaringan yang rusak akibat tersambar petir dan sebagainya.

Meski demikian Gus Irawan yang didampingi beberapa anggota Komisi VII lainnya seperti Kurtubi, Nazaruddin Kiemas, Yulian Gunhar, Melda Addriyani, Ari Yusnita, dan Ferry Kase ini mengapresiasi PLN yang bersikap cepat tanggap atau responsif jika ada permasalahan listrik di masyarakat. ■ ayu/sc



Tim Kunker Komisi VII DPR meninjau Terminal BBM Kertapati MOR II di Sumsel

Kemenag Diminta Buat Inovasi Bahwa Radikalisme Bukan Milik Islam

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti meminta jajaran Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, untuk membuat inovasi bahwa radikalisme bukan milik Agama Islam. Dalam Agama Islam dan agama apapun, tidak ada ajaran soal radikalisme.



Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti

Foto: Ayu/hr

“Masalahnya bagaimana menghilangkan stigma itu tentu butuh inovasi. Bagaimana Kemenag dan Dirjen Pendidikan Islam untuk memotivasi semua jajaran di bawahnya,” ungkap Endang, saat Rapat Kerja dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

Dalam rapat yang membahas rancangan pendahuluan RAPBN 2019

dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong itu, Endang bahkan menekankan bahwa justru Pendidikan Agama Islam itu menjadi *champion*-nya untuk bisa menarik orang, bahwa Islam memang *rahmatallil alamin*.

Lebih lanjut politisi Golkar ini menyebutkan ada beberapa aspirasi dari pondok pesantren agar lebih diperhatikan oleh pemerintah. Mereka merasa kualitasnya tidak kalah dengan

pendidikan formal, tapi kenapa tak pernah mendapatkan perhatian dari sisi kesetaraan kelulusan.

“Ini juga perlu perhatian dari Kemenag dan Dirjen, bahwa pendidikan mereka juga berkualitas karena itu jangan dianggap radikalisme. Makanya perlunya

RUU KUHP Tidak Perlemah KPK

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengakui ada keberatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LSM penggiat anti korupsi terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah dibahas DPR. Salah satunya, RUU ini dianggap memperlemah KPK.



Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

Foto: Kresno/hr

“Saya tegaskan bahwa RUU KHUP ini tidak dimaksudkan untuk memperlemah KPK. Disebut memperlemah kalau kewenangannya dikurangi, kalau tidak dikurangi *enggak* memperlemah. Kalau kewenangannya ditambah, juga *enggak* memperkuat,” tegas Arsul kepada pers, jelang Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5).

Meski demikian, politisi PPP ini menyatakan, konsen dari KPK dan penggiat LSM Anti Korupsi akan dipikirkan, tanpa kemudian memenuhi tuntutan mereka mencabut semua delik korupsi dari RUU KUHP. Sedangkan jalan keluarnya, lanjut Arsul, nanti pada ketentuan peralihan atau penutup, ditegaskan adanya delik-delik tertentu dalam RUU KUHP itu tidak mengurangi

kewenangan kelembagaan dalam tugas-tugas penegakan hukum yang oleh UU diberikan kepada lembaga tersebut.

Bahkan kalau perlu ditegaskan, tambah Arsul, bahwa lembaga tersebut berwenang menerapkan pasal-pasal. Misalkan kasus narkoba oleh BNN, korupsi oleh KPK yang ada dalam RUU KUHP. “Kalau itu bunyi UU, maka sebetulnya penguatan KPK karena bisa

Perbaikan rumusan itu diperlukan supaya tidak menimbulkan pasal karet. Selain itu, ada pasal-pasal yang masih menimbulkan kontroversi, kini ditegaskan arahnya, misalnya tentang pasal penghinaan Presiden. Baik Panja pemerintah maupun DPR sepakat perlunya pasal penghinaan Presiden, namun tidak boleh menabrak keputusan MK.

inovasi tadi,” tandas politisi dapil Jateng itu.

Sedangkan Anggota Komisi VIII DPR RI Lilis Santika menyoroti kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dinilai hanya tempat kumpul-kumpul dan pindah makan. Sebab kinerjanya secara signifikan belum terlihat, apalagi dalam RAPBN 2019 meminta tambahan anggaran.

“Progress report FKUB perlu dievaluasi, dan daerah mana yang akan mendapat tambahan anggaran dari Kemenag,” kritisi politisi PKB itu.

Ia juga menyoroti adanya slogan ‘madrasah lebih baik dan lebih baik madrasah’, tapi kenyataan di lapangan, jauh panggang dari api. Bahkan banyak madrasah negeripun kalah dari madrasah swasta. Banyak madrasah di pelosok-pelosok yang perlu bantuan kaitannya dengan sarana dan prasarana.

“Ini tidak saja di Banten tetapi juga daerah lain. Ada kiriman foto dari Sambas, Kalbar juga sangat memprihatinkan. Mohon ini diprioritaskan,” tekan legislator dapil Jabar IX itu. ■ mp/sf

menggunakan UU Tipikor maupun pasal korupsi dalam KUHP,” tambah politisi PPP itu.

Arsul menjelaskan perkembangan pembahasan RUU yang ditargetkan selesai pada Agustus mendatang, saat ini posisinya tinggal melakukan perbaikan rumusan-rumusan yang dihasilkan oleh Tim Perumus (Timus) pada dua masa sidang lalu.

Perbaikan rumusan itu diperlukan supaya tidak menimbulkan pasal karet. Selain itu, ada pasal-pasal yang masih menimbulkan kontroversi, kini ditegaskan arahnya, misalnya tentang pasal penghinaan Presiden. Baik Panja pemerintah maupun DPR sepakat perlunya pasal penghinaan Presiden, namun tidak boleh menabrak keputusan MK. Pemerintah pun menerima usulan fraksi-fraksi agar pasal itu menjadi delik aduan.

Kemudian pasal yang juga dikritisi yaitu tentang perbuatan cabul sesama jenis (LGBT), pemerintah mengalihkan rumusannya. Sehingga dalam satu pasal itu perbuatan cabul akan dihukum, baik dilakukan sesama jenis maupun terhadap lawan jenis. Menurut Arsul, ini tidak terkesan diskriminatif, karena siapapun yang melakukan cabul kepada siapapun akan kena pidana. ■ mp/sf

DPR Terus Perjuangkan Tenaga Honorer K2

DPR RI akan terus memperjuangkan para Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) di seluruh Indonesia, baik yang ada di kementerian atau lembaga untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengangkatan para Tenaga Honorer K2 menjadi ASN akan ditempuh lewat tes seleksi kembali. Semua kementerian dan lembaga belum boleh membuka formasi ASN baru, sebelum menyelesaikan para Tenaga Honorer K2-nya.

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso mengungkapkan hal ini Senin sore (4/6), di ruang kerjanya usai mengikuti rapat gabungan Komisi I hingga Komisi XI DPR dengan pemerintah, membahas nasib Tenaga Honorer K2.

Disampaikan Imam, para Tenaga Honorer K2 yang memiliki jenjang pendidikan minimal D3 dengan usia maksimal 35 tahun akan mendapat prioritas mengikuti seleksi ASN. Mereka yang lulus otomatis diangkat menjadi ASN. Bagi yang tidak lulus atau tidak memenuhi persyaratan sebagai ASN, akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ketika ditanya apakah Tenaga Honorer K2 yang sudah berusia lebih dari 40 tahun dan hanya lulusan SMA bisa mengikuti seleksi ASN? Politisi PDI Perjuangan ini menjawab, “Normatifnya 35 tahun. Yang sudah 40 tahun ke atas, akan ada terobosan pengangkatan dengan Peraturan Presiden. Bila tidak diangkat menjadi ASN akan diangkat menjadi PPPK. Bila tak juga masuk kualifikasi PPPK, maka yang bersangkutan diangkat menjadi tenaga honorer dengan standar gaji sesuai UMR.”

Tenaga Honorer K2 yang belum lulus tes seleksi ASN di seluruh Indonesia mencapai 438.590 orang. Mereka, kata Imam, adalah yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak dibiayai APBN/APBD. Jadi, berdasarkan hasil rapat antara DPR dan pemerintah, ada tiga peluang status bagi para Tenaga Honorer K2 untuk resmi diangkat menjadi pegawai yang dibiayai APBN/APBD, yaitu menjadi ASN, PPPK, dan honorer sesuai UMR. Hasil keputusan sementara ini diharapkan bisa melegakan hati para Tenaga Honorer K2 di seluruh Indonesia.

Ditambahkan Imam, Tenaga Honorer K2 banyak sekali jenisnya, seperti bidan PTT, dokter PTT, guru PTT, penyuluh PTT,

dan lain-lain. Kecuali, sambung Imam, tenaga sukarela di Kementerian Sosial yang tidak masuk kategori K2. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto itu menghasilkan dua kesimpulan rapat. Pertama, pemerintah akan menyelesaikan status Tenaga Honorer K2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, DPR RI dan pemerintah sepakat akan melakukan rapat kerja gabungan lanjutan pada hari Senin, 23 Juli 2018 dengan agenda tahapan penyelesaian Tenaga Honorer K2 dan akan mengundang juga Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada bagian lain politisi dari dapil Jateng III ini menjelaskan, para guru K2 yang dulu hanya mengajar linier untuk satu mata pelajaran, kini boleh mengajar untuk 2 mata pelajaran lebih. Harapannya, para guru K2 itu bisa mendapat tambahan honor dari sekolah tempatnya mengajar.

“Semua guru akan diperjuangkan untuk diangkat, termasuk yang saya perjuangkan adalah PTT bidan dan PTT dokter gigi. Kami dari DPR juga akan memperjuangkan terus seluruh tenaga K2 honorer supaya bisa jadi ASN, PPPK, atau honorer sesuai UMR,” tutup Imam. ■ mh/sf



Foto: Arief/hr

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso



Tim Kunker Komisi X DPR berfoto bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat

Foto: Eka/hr

Komisi X Inisiasi Kurikulum Berbasis Budaya

Dewasa ini, sistem pendidikan di Indonesia telah melahirkan siswa yang tidak kenal dengan kearifan lokal daerahnya. Sebaliknya, mereka lebih kenal dan bangga dengan budaya luar. Hal ini bisa terlihat dari cara berbicara, berpakaian, pola pikir dan sederet gaya hidup lainnya.

“ Sistem pendidikan kita telah membuat siswa tidak mengenal kearifan budaya lokal daerah mereka sendiri, ini membuat mereka asing dengan adat istiadat tempat mereka lahir atau tinggal,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra saat memimpin kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Padang, Sumatera Barat, Rabu (30/5).

Untuk mengatasi hal ini, Komisi X DPR RI mencoba menginisiasi sebuah kurikulum pendidikan yang berbasis budaya secara nasional. Sehingga kunker

ke Sumatera Barat ini menjadi upaya Komisi X DPR RI menjangkit masukan terkait kurikulum yang akan diterapkan nantinya.

Kurikulum berbasis budaya sendiri merupakan sebuah kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan

berbudaya. Dalam konteks ini, jelas Sutan, berbudaya mengandung arti setiap individu mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat.

“Sehingga kurikulum ini nanti berorientasi pada pembentukan manusia yang memiliki watak beradab serta bermartabat, yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan tata nilai akhlak budi pekerti yang luhur,” tandas politisi Partai Gerindra itu. ■ hr/sf

Komisi X DPR RI mencoba menginisiasi sebuah kurikulum pendidikan yang berbasis budaya secara nasional. Sehingga kunker ke Sumatera Barat ini menjadi upaya Komisi X DPR RI menjangkit masukan terkait kurikulum yang akan diterapkan

SDM Pelaksana UNBK Belum Sigap Atasi Persoalan

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, pada hakekatnya Komisi X DPR mendorong pelaksanaan akselerasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Namun Komisi X melihat masih ada beberapa hal penting yang kurang diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya adalah sektor Sumber Daya Manusia (SDM) yakni orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK yang dinilai masih belum sigap dalam mengatasi persoalan UNBK.

Provinsi DIY, Ferdi mengatakan bahwa Yogyakarta sebagai provinsi dipandang sangat relevan dalam kaitannya dengan kurikulum berbasis budaya. “Kita sadari bahwa selama ini banyak radikalisme dan hal-hal yang tidak sesuai dengan akar budaya bangsa Indonesia. Oleh karenanya kami memandang perlu untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kurikulum berbasis budaya. Apalagi saat ini kita telah mempunyai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menjadi dasarnya,” terang Ferdi.

Dikatakannya, selain itu Yogyakarta juga memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mengenai kebudayaan. “Setelah kita kaji, nanti hasilnya kita serahkan kepada Kemendikbud. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan dijadikan sebagai provinsi pilot

“ Bukan berarti tidak ada kemajuan, tetapi jangan memaksakan diri untuk dilakukan secara menyeluruh. Mengingat sarana dan prasarana UNBK masih belum merata di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Masih banyak yang perlu dilakukan rehabilitasi,” papar Ferdiansyah di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi X ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (30/5).

Ferdi mengatakan, seandainya diberikan sarana dan prasarana di luar masalah gedung seperti perangkat komputer, namun tidak menutup kemungkinan adanya peluang terjadi hal-hal di luar keinginan. Menurutnya, SDM yang ada juga harus ditingkatkan kemampuannya dalam hal perawatan sarana dan prasarana IT tersebut.

“Yang menjadi persoalan lainnya adalah yang berada di luar wilayah kewenangan Kemendikbud, yaitu internet dan listrik. Belum seluruh sekolah yang sudah teraliri saluran listrik, seandainya pun listrik sudah teraliri tetapi terkadang masih ada yang kondisinya sering mati hidup,” ujar politisi Fraksi Golkar itu.

Terkait masalah evaluasi UNBK, sambung Ferdi, sebenarnya Komisi X sudah dapat menduga persoalan-persoalan yang mungkin akan dihadapi. “Ini akan menjadi sesuatu yang berat, karena pemerintah tidak membuat peta jalan dan kesannya memaksakan diri.

Oleh karenanya Panja Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Komisi X DPR memberikan solusi bahwa khusus untuk sarana dan prasarana pendukung UNBK seperti penyediaan sarana komputer, anggarannya dimasukkan pada dana Bantuan Operasional Sekolah.

Dengan kata lain, lanjutnya,

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana komputer tersebut dilakukan dengan cara sewa, bukan dengan cara membeli. “Karena kalau dengan cara membeli dan hanya digunakan untuk pelaksanaan UNBK, tentu hal ini akan memakan biaya yang sangat besar,” imbuhnya.

Ferdi menyatakan, Komisi X DPR mendorong akselerasi UNBK namun dengan catatan harus menyeluruh, yakni perlu ada perbaikan terhadap



Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat mengikuti Kunjuran Komisi X DPR ke Yogyakarta

SDM serta sarana dan prasarana pendukungnya. “Kata kuncinya adalah silahkan melakukan akselerasi tetapi jangan memaksakan diri,” tandasnya.

Perihal tujuan kehadiran Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke

project pelaksanaan kurikulum berbasis budaya atau percontohan kurikulum berbasis budaya. Sebab DNA dari warga negara Indonesia adalah kebudayaan,” pungkasnya. ■ as/sc

Pendidikan Khattam Al-Quran Jadi Pendidikan Berbasis Budaya di Kalsel



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

Foto: Nadya/hr

yang harus dibenahi atau diperbaiki ke depannya,” imbuhnya kepada Parlementaria.

Dalam kesempatan tersebut, Hetifah juga menegaskan adanya Pendidikan Khattam Al-Quran sebagai budaya dari Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat menjadi penangkal atau penetralisir dari adanya pemahaman ideologi radikalisme, juga terorisme.

Sementara itu Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor berharap dengan adanya Kunjungan Komisi X DPR RI ke provinsinya dapat menyalurkan bantuan berupa dana pendidikan berbasis budaya, yang manfaatnya dapat dirasakan bagi masyarakat Kalsel.

“Harapan kita tentu apa yang sudah diberikan diperjuangkan oleh Komisi X DPR RI untuk pendidikan kebudayaan di Kalsel ini bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri rakyat Kalsel pastinya. Bermanfaat kemudian kalau bisa ada perjuangan yang lebih signifikan lagi,” ucapnya.

Menurut Sahbirin, budaya Kalsel sangat banyak dan memiliki khas keunikan tersendiri. “Saya kasih contoh yang tadi itu. Yang juga hampir budaya itu hampir sirna dengan pengaruh jaman saat ini, tapi kita selalu mengupayakan untuk kita boomingkan lagi. Itu hanya salah satu, yang lainnya masih banyak lagi kebudayaan Kalimantan Selatan,” tandasnya.

Turut serta Anggota Komisi X DPR dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan antara lain Asdy Narang (F-PDIP), Muslim (F-PD), Amran (F-PAN), Zainul Arifin Noor (F-PKB), Toriq Hidayat (F-PKS), Anas Thahir (F-PPP), Titik Prasetyo Verdi (F-Nasdem), Iwan Kurniawan (F-Gerindra), dan Muhammad Suryo Alam (F-PG). ■ ndy/sc

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengemukakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan kurikulum berbasis budaya adalah dengan mengaplikasikan pendidikan Khattam Al-Quran yang diwajibkan kepada siswa-siswi kelas 6 Sekolah Dasar.

“ Karena ini adalah provinsi yang kaya sejarah dan budaya. Kami melihat keseriusan dari Pemprov Kabupaten/ Kota untuk menerapkan kurikulum berbasis budaya. Salah satunya di sini ada penerapan pendidikan Al-Quran yang menegaskan bahwa murid-murid sampai di kelas 6 SD mereka itu harus sudah khattam. Dan memang khattam itu adalah suatu budaya setempat yang sangat dipertahankan saat ini di kurikulum-kurikulum yang ada di sekolah,” ujarnya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dengan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor terkait pengawasan implementasi kurikulum berbasis budaya, di Banjarmasin, Rabu (30/5).

Namun lanjut politisi Partai Golkar ini, di dalam pelaksanaannya masih ada

beberapa persoalan-persoalan yang perlu disempurnakan terkait dengan penyusunan silabus, juga keberadaan daripada tenaga pengajar atau gurunya.

“Yang harus dilakukan sekarang ini adalah harus direkrut secara khusus. Tapi juga mereka ternyata belum mendapatkan pengakuan dalam arti statusnya, sertifikasi juga masih sulit karena ada beberapa pengaturan, yang kurang fleksibel dan juga di dalam data pokok pendidikannya,” ungkapnya.

Hetifah berharap, pengadaan baik sarana dan prasarana peralatan penunjang daripada Khattam Al-Quran tidak hanya menyediakan Al-Quran saja, akan tetapi juga menyediakan Al-Quran Braille bagi peserta didik yang difabel. “Kemudian juga mungkin bagi mereka yang beragama lain di luar Islam, juga merupakan tantangan



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menghadiri acara buka puasa bersama Presiden RI, Panglima TNI dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara di Mabes TNI Cilangkap Depok, Selasa (5/6) Foto: Jayadi/hr



Ketua DPR Bambang Soesatyo menerima perwakilan Kepala Suku Adat Papua di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6). Foto: Jaka/hr



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima perwakilan Tokoh Masyarakat Morowali di Ruang Kerja Pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6). Foto: Oji/hr



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Mau motor
Zaman now?

IKUTI LOMBA
KRITIK TERBAIK DPR

KIRIM MEME & ESSAY
MEME (gambar, karikatur, video)
ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA:
19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018
PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: Motor Zaman Now
Juara I Rp 10 juta, Juara II, Rp 7 juta,
Juara III Rp 5 juta

KIRIM KE:

SAAT PENGUMUMAN
DILANGSUNGKAN LOMBA STAND UP COMEDY



lombakritikterbaikDPR@gmail.com



lombakritikterbaikDPR@yahoo.com



[@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)



[@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)



[@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)